

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006
- Anonimous, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Inosentius Samsul, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Kosntitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Hamzah Halim dan Kemal Relindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2010
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media (Cetakan VIII), Bandung, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakata, 2006.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. PSHTN FHUI, Jakarta, 2004.
- , *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.

Kaelan H. dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

Khairul Fahmi, dkk. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.

Muchamad Ali Safa'at, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi, Jakarta, 2010.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI : Kajian Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group (Cetakan ke-6), Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Sri Mumadji, *Penelitian hukum normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Penyelesaian Mahkamah Kontitusi oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XIV/2016

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015

Provinsi Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

C. Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 (ISSN 1829-7706)

Amrizal J. Prang, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 13 No. 1, April 2011 (ISSN 2527-8428)

Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, Fiat Justisia Journal Of Law, Faculty of Law, Lampung University, Volume 10 Issue 4, October-December 2016 (Issn 1978-5189)

Ayu Desiana, *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*, Majalah Hukum Forum Akademika, Fakultas Hukum Univesitas Jambi, Volume 25, Nomor 1, Maret 2014 (ISSN 0854-789 X)

Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Kosntitusi, Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Volume 11 Nomor 1, Maret 2014 (ISSN 1829-7706)

Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Volume 13 Nomor 3, Desember 2011 (ISSN 0854-5499)

Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pegawasannya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Volume 18, Nomor 3, Juli 2011 (ISSN 0854-8498)

Leo Agustino, *Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Suatu Analisis Singkat*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume III Nomor 1, April 2017 (ISSN 2442-5958)

Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Volume II Nomor 2, Mei – Agustus 2015 (ISSN 2355-0481)

D. Majalah

Konstitusi, "*Bersengkarut Pilkada di Papua*", Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Kontitusi, Nomor 122, Edisi April 2017

Konstitusi, "*Perda Kabupaten/Kota*", Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Kontitusi, Nomor 123, Edisi Mei 2017

Konstitusi, "*Permudah Dukungan Calon Independen*", Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Kontitusi, Nomor 125, Edisi Juli 2017

E. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Mahmud Yunus, *Kamus-Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

F. Materi Perkuliahan

Zaki Ulya, *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2017.

G. Internet

"*Presiden Umumkan Pembatalan 3143 Perda Bermasalah*", <http://kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasakah/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018

"*Makna Azas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*", <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ol6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara>, diakses pada 17 Januari 2018

"*Arti Kata Implikasi*", www.ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi, diakses pada 19 Januari 2018